

**KRISIS PANGAN DI SUDAN 2023–2024
DAMPAK KONFLIK TERHADAP KETAHANAN PANGAN DAN SITUASI
KEMANUSIAAN**

Gita Adelya Putri¹, Adhi Munajar²

Pendidikan Geografi

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: gitaadelyaputri@gmail.com, adhi.munajar@uin-suska.ac.id

Abstrak

Krisis pangan di Sudan pada periode 2023–2024 merupakan salah satu kondisi kemanusiaan paling serius di Afrika akibat pecahnya konflik bersenjata antara Sudan Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF). Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konflik memengaruhi ketahanan pangan dan akses bantuan kemanusiaan di Sudan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif melalui studi literatur dari laporan resmi FAO, WFP, OCHA, UNICEF, serta publikasi ilmiah terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk Sudan menghadapi kerawanan pangan akut (IPC Phase 3+), terutama di wilayah Gezira, Darfur, dan Kordofan. Konflik memaksa petani meninggalkan lahan, merusak jaringan irigasi, dan menghambat distribusi pangan, sementara inflasi tinggi menurunkan daya beli masyarakat. Selain itu, pembatasan akses kemanusiaan memperburuk kondisi kelompok rentan. Hasil kajian ini menegaskan bahwa konflik, tekanan ekonomi, dan hambatan bantuan merupakan faktor utama yang memperdalam krisis pangan di Sudan serta membutuhkan intervensi terkoordinasi untuk memulihkan sistem pangan dan melindungi masyarakat terdampak.

Kata kunci: Krisis pangan; Konflik Sudan; Ketahanan pangan

Abstract

The food crisis in Sudan during the 2023–2024 period represents one of the most severe humanitarian emergencies in Africa, triggered by the outbreak of armed conflict between the Sudan Armed Forces (SAF) and the Rapid Support Forces (RSF). This study aims to analyze how the conflict has affected food security and access to humanitarian assistance in Sudan. A qualitative-descriptive approach was employed through a literature review of official reports from FAO, WFP, OCHA, UNICEF, and relevant scientific publications. The findings indicate that more than half of Sudan's population is experiencing acute food insecurity (IPC Phase 3+), particularly in the Gezira, Darfur, and Kordofan regions. The conflict has forced farmers to abandon their farmlands, damaged irrigation networks, disrupted food distribution, and driven inflation that reduces households' purchasing power. Moreover, restricted humanitarian access has worsened the conditions of vulnerable groups. This literature-based analysis underscores that conflict, economic pressures, and aid access barriers are the main drivers intensifying

Sudan's food crisis, and that coordinated interventions are urgently required to restore the food system and protect affected populations.

Keywords: Food insecurity; Sudan conflict; Humanitarian crisis

PENDAHULUAN

Krisis pangan yang melanda Sudan pada periode 2023–2024 merupakan salah satu krisis kemanusiaan terbesar dan paling kompleks di kawasan Afrika. Konflik bersenjata antara Sudan Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF) yang pecah pada tahun 2023 telah mengakibatkan kerusakan serius terhadap struktur sosial, ekonomi, dan infrastruktur nasional. Ketidakstabilan ini memperlemah sistem pangan yang sebelumnya sudah rentan akibat ketergantungan pada pertanian tradisional, perubahan iklim, dan ketidakpastian politik yang berlangsung bertahun-tahun. Ketika pertempuran menyebar ke wilayah pemukiman dan sentra produksi pertanian, aktivitas pertanian terganggu secara drastis, menyebabkan penurunan hasil panen, kehilangan akses terhadap lahan, serta berkurangnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Selain menurunkan produksi pangan, konflik juga menyebabkan distribusi pangan terhenti di banyak wilayah. Jalur transportasi utama rusak atau diblokade, pasar lokal berhenti beroperasi, dan harga komoditas pangan melonjak akibat kelangkaan barang. Kondisi ini diperparah oleh perpindahan penduduk secara masif. Jutaan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan kehilangan mata pencaharian, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan harian. Di wilayah seperti Khartoum, Darfur, dan Kordofan, masyarakat berada dalam kondisi yang mendekati kelaparan karena akses terhadap makanan, air bersih, dan layanan kesehatan hampir sepenuhnya terputus.

Dari sisi ekonomi, Sudan menghadapi tekanan inflasi yang sangat tinggi sepanjang periode konflik. Melemahnya nilai mata uang lokal menyebabkan harga pangan naik secara tidak terkendali dan daya beli masyarakat terus menurun. Keterbatasan bahan bakar turut menghambat produksi dan distribusi, sementara rusaknya fasilitas penyimpanan, irigasi, dan logistik memperparah kerentanan sistem pangan. Dampak interaksi antara faktor keamanan, ekonomi, dan infrastruktur ini menghasilkan situasi krisis yang melampaui sekadar persoalan ketersediaan makanan, tetapi mencerminkan runtuhnya seluruh komponen sistem pangan nasional.

Intervensi kemanusiaan dari lembaga internasional seperti WFP, UNICEF, dan OCHA juga menghadapi tantangan besar. Banyak wilayah tidak dapat dijangkau karena risiko keamanan yang tinggi, pembatasan akses dari kelompok bersenjata, serta kondisi jalan yang

tidak dapat dilalui. Keterbatasan akses ini menjadikan bantuan tidak merata, sehingga area yang paling terdampak justru sulit mendapatkan dukungan. Keadaan tersebut meningkatkan angka gizi buruk, terutama pada anak-anak dan kelompok rentan lainnya, serta berpotensi menyebabkan peningkatan angka kematian jika tidak segera ditangani.

Krisis pangan di Sudan pada 2023–2024 menjadi contoh nyata bagaimana konflik bersenjata dapat mempercepat keruntuhan sistem pangan nasional dan menciptakan siklus kerentanan yang sulit diputus. Memahami dinamika krisis ini penting untuk melihat hubungan antara kekerasan, ketidakstabilan ekonomi, dan kondisi kemanusiaan. Pendahuluan ini menjadi dasar untuk analisis yang lebih mendalam mengenai penyebab utama krisis, mekanisme kerusakan sistem pangan, serta implikasi kemanusiaan bagi masyarakat Sudan. Kajian ini juga menegaskan pentingnya respons internasional yang terkoordinasi untuk mengurangi dampak krisis dan mencegah kerentanan yang berkelanjutan

TINJAUAN PUSTAKA

Ketahanan pangan secara global dipahami melalui empat pilar utama yang dirumuskan oleh FAO, yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas sistem pangan dalam jangka panjang (FAO, 2024). Konflik bersenjata merupakan salah satu ancaman paling besar terhadap keempat pilar tersebut. Dalam konteks Sudan, konflik internal yang kembali meletus pada tahun 2023 telah mengganggu proses produksi pertanian secara masif, terutama pada wilayah sentra pangan di Khartoum, Darfur, dan Kordofan. Gangguan ini menciptakan gejolak yang tidak hanya menurunkan kapasitas produksi, tetapi juga menurunkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri (WFP, 2024). Ketika petani kehilangan akses ke lahan dan sarana produksi, sistem pangan nasional memasuki fase kerentanan ekstrem.

Konflik juga menimbulkan runtuhnya jaringan distribusi pangan yang selama ini menjadi penghubung antara daerah penghasil dan daerah konsumsi. Jalur transportasi yang diblokade serta kerusakan fasilitas penyimpanan menyebabkan harga komoditas meningkat tajam dan akses masyarakat terhadap pangan menjadi sangat terbatas (OCHA, 2024). Kondisi ekonomi yang semakin memburuk menciptakan penurunan daya beli, di mana inflasi yang tidak terkendali membuat masyarakat semakin rentan terhadap kelaparan. Menurut World Bank (2023), krisis ekonomi Sudan sebelum konflik pun sudah menunjukkan tren penurunan

kesejahteraan, sehingga konflik mempercepat keruntuhan struktur ekonomi dan memperberat krisis pangan.

Selain konflik dan ekonomi, perubahan iklim juga menjadi faktor yang sering diidentifikasi dalam studi-studi mengenai kerawanan pangan di Sudan dan negara-negara Sahel lainnya. Kekeringan yang berulang, degradasi lahan, serta curah hujan yang tidak stabil telah menurunkan produktivitas pertanian dalam beberapa dekade terakhir (FEWS NET, 2024). Situasi ini membuat masyarakat semakin bergantung pada bantuan ketika krisis politik terjadi. Dengan demikian, kombinasi antara tekanan ekologis dan kekacauan sosial politik mempersempit ruang adaptasi masyarakat untuk bertahan hidup. Penelitian oleh IPC (2024) menegaskan bahwa sebagian besar wilayah terdampak krisis berada pada fase darurat kerawanan pangan yang berpotensi meningkat menjadi kelaparan akut jika situasi memburuk.

Dalam kondisi seperti ini, bantuan kemanusiaan berperan sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, lembaga internasional banyak mengalami kendala ketika menyalurkan bantuan karena pembatasan akses dan ancaman keamanan yang tinggi di medan konflik (ACAPS, 2024; UNICEF, 2024). Hambatan tersebut menyebabkan kesenjangan distribusi yang signifikan, di mana wilayah yang paling membutuhkan sering kali justru paling sulit dijangkau. UNHCR (2024) mencatat bahwa jutaan warga mengungsi tanpa kepastian akses pangan dan layanan kesehatan, sementara tingkat gizi buruk pada anak-anak meningkat secara drastis. Pada titik ini, krisis pangan Sudan telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan menyeluruh.

Literatur yang membahas krisis pangan Sudan menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah kelangkaan pasokan makanan. Keruntuhan sistem pangan merupakan akibat langsung dari interaksi faktor kekerasan, ketidakstabilan ekonomi, kemunduran lingkungan, dan terbatasnya intervensi bantuan (Crisis Group, 2024). Pemahaman secara multidimensi sangat diperlukan untuk menjelaskan bahwa setiap gangguan dalam satu aspek akan memicu ketidakstabilan dalam aspek lainnya. Oleh sebab itu, kajian mengenai Sudan memerlukan perspektif yang menempatkan konflik sebagai pemicu utama, namun tetap melihat peran faktor struktural lain yang memperpanjang siklus kerentanan pangan yang sudah terjadi jauh sebelum konflik terbaru pecah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur untuk menganalisis dinamika krisis pangan di Sudan pada periode 2023–2024. Data yang digunakan sepenuhnya berasal dari sumber sekunder, meliputi laporan resmi lembaga internasional seperti FAO, WFP, OCHA, UNICEF, World Bank, dan IPC, serta artikel ilmiah dan publikasi akademik yang relevan. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kredibilitas lembaga penerbit dan relevansinya terhadap topik penelitian.

Seluruh literatur yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pola tematik, hubungan sebab-akibat, serta faktor-faktor utama yang memengaruhi ketahanan pangan selama konflik berlangsung. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif dan terstruktur mengenai kondisi ketahanan pangan, gangguan distribusi, kerentanan ekonomi, dan hambatan bantuan kemanusiaan di Sudan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menyajikan konstruksi pemahaman yang mendalam mengenai interaksi antara konflik dan kerawanan pangan sebagai isu kemanusiaan yang saling berkaitan (FAO, 2024; WFP, 2024; OCHA, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis pangan di Sudan pada periode 2023 sampai 2024 menunjukkan keruntuhan menyeluruh pada sistem pangan nasional sebagai dampak langsung dari konflik bersenjata yang melibatkan Sudan Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RAF). Pertempuran yang meluas ke kawasan produksi pertanian telah mengakibatkan lahan terbengkalai, jaringan irigasi rusak, dan aktivitas panen terhenti. Kondisi ini paling parah terjadi di wilayah Gezira, Darfur, dan Kordofan yang sebelumnya merupakan pusat produksi pangan utama. Situasi tersebut dapat dilihat melalui peta wilayah terdampak krisis pangan yang menggambarkan konsentrasi kerawanan yang sangat tinggi pada daerah yang menjadi medan pertempuran.



Gambar 1. Peta wilayah Sudan terdampak krisis pangan 2023–2024

Sumber: OCHA (2024), diolah penulis

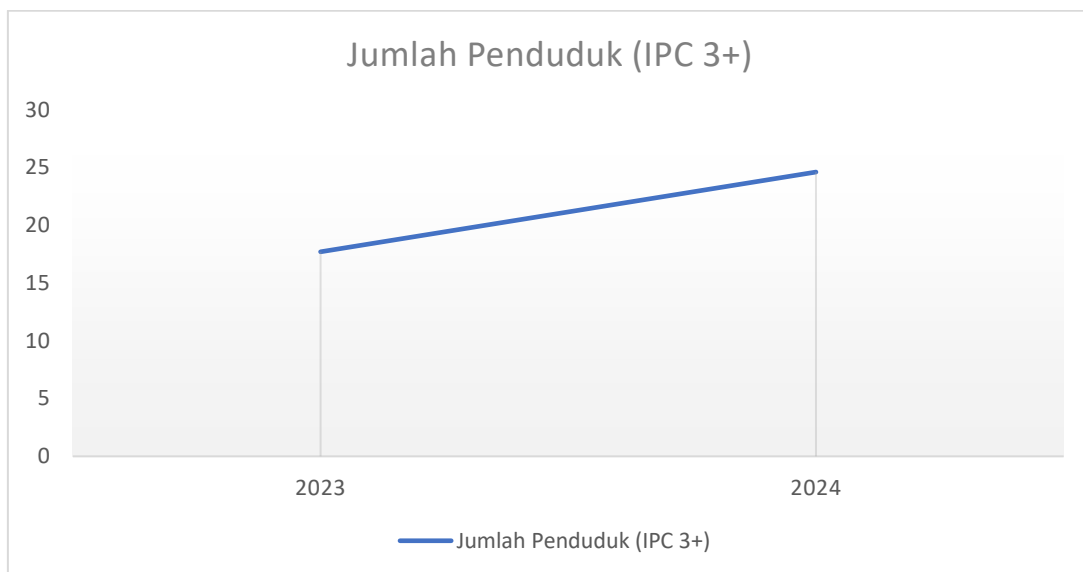
Selain gangguan pada produksi, krisis pangan juga tercermin dari besarnya jumlah penduduk Sudan yang mengalami kerawanan pangan akut. Berdasarkan data dari IPC (2024) yang meliputi seluruh negara bagian, diperkirakan sekitar 24.517.843 orang berada pada kondisi kerawanan pangan akut (IPC Phase 3 ke atas), setara dengan 51% dari populasi yang dianalisis. Rincian distribusinya menunjukkan 15.894.224 orang pada Phase 3 (Crisis), 8.098.590 orang pada Phase 4 (Emergency), dan 525,029 orang pada Phase 5 (Catastrophe). Distribusi ini mempertegas bahwa lebih dari separuh populasi terindikasi mengalami kerawanan pangan akut, dengan konsentrasi paling tinggi pada wilayah-wilayah konflik seperti Gezira, Darfur, dan Kordofan (IPC, 2024; WFP, 2024). Distribusi tingkat kerawanan pangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1: Jumlah penduduk terdampak per fase IPC di Sudan, October-November 2024

| Fase IPC / Tingkat Kerawanan | Jumlah Penduduk | Keterangan |
|-------------------------------------|------------------------|---|
| Phase 3 – Crisis | 15,894,224 | Food insecurity serius |
| Phase 4 – Emergency | 8,098,590 | Ancaman malnutrisi tinggi |
| Phase 5 – Catastrophe | 525,029 | Kekurangan pangan ekstrem, risiko kelaparan |
| Total | 24,517 | Jumlah orang terdampak akut |

Sumber: WFP & IPC (2024), diolah penulis.

Dinamika krisis juga tampak dari peningkatan jumlah populasi yang berada pada tingkat kerawanan pangan akut (IPC Phase 3+). Berdasarkan laporan IPC dan WFP pada tahun 2023 hingga akhir 2024, terdapat kecenderungan peningkatan jumlah penduduk dalam kategori krisis pangan seiring dengan eskalasi konflik yang semakin meluas. Wilayah yang awalnya tidak menjadi pusat pertempuran mulai terdampak, termasuk area produksi pangan utama seperti Al Jazirah dan wilayah-wilayah Darfur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa krisis pangan tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang ke arah yang lebih buruk dan belum menunjukkan tanda pemulihan yang signifikan.



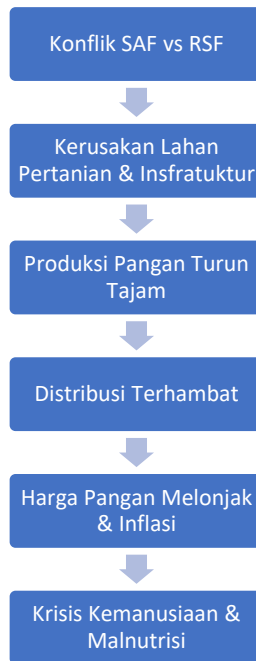
Grafik 1. Tren jumlah penduduk terdampak IPC Phase 3+ (2023–2024)

Sumber: Data IPC (2023–2024), diolah penulis.

Salah satu penyebab utama semakin parahnya kondisi adalah terputusnya distribusi pangan. Banyak pasar berhenti berfungsi akibat pengepungan wilayah, jalur transportasi yang tidak dapat diakses, serta melonjaknya harga kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi menyebabkan pendapatan rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Akibatnya, konsumsi pangan menurun dan angka gizi buruk terus meningkat terutama pada anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.

Konflik juga menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan. Lembaga internasional mengalami kesulitan mengakses wilayah yang dikontrol kelompok bersenjata, sehingga bantuan yang semestinya dapat menekan laju krisis justru tertahan. Beberapa konvoi bantuan dirampas, jalur pengiriman darat berbahaya, dan koridor udara sangat terbatas. Kondisi tersebut memperburuk situasi bagi masyarakat yang paling membutuhkan karena mereka justru menjadi

kelompok yang paling sedikit menerima bantuan. Hubungan antara konflik, keruntuhan ekonomi, dan minimnya akses kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling memperkuat satu sama lain. Diagram berikut menjelaskan alur bagaimana konflik memicu gangguan ketahanan pangan dan menyebabkan peningkatan kerawanan yang semakin dalam.



Gambar 2. Diagram alur dampak konflik terhadap kerawanan pangan di Sudan

Sumber: Diolah penulis (2024).

Berdasarkan keterkaitan tersebut, jelas bahwa krisis pangan yang terjadi di Sudan merupakan bentuk kolaps struktural yang melibatkan berbagai faktor saling bergantung. Kerusakan sistem produksi mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, sementara lemahnya ekonomi mempersempit akses pangan bagi masyarakat. Ketika bantuan pun tidak dapat masuk, keluarga terjebak dalam kondisi kelaparan berkepanjangan tanpa kemampuan untuk pulih.

Dengan demikian, temuan pembahasan ini menegaskan bahwa eskalasi konflik merupakan faktor utama yang memperdalam dan memperluas kerawanan pangan. Bukti geografis, statistik populasi terdampak, dan tren peningkatan keparahan memperlihatkan bahwa krisis ini memerlukan penanganan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pemulihan sektor pangan, tetapi juga stabilisasi keamanan nasional, dukungan ekonomi berkelanjutan, dan pembukaan akses kemanusiaan secara luas. Tanpa langkah tersebut, kehidupan jutaan penduduk Sudan tetap berada dalam ancaman berkelanjutan dari waktu ke waktu.

KESIMPULAN

Krisis pangan di Sudan pada tahun 2023 sampai 2024 memperlihatkan keterpurukan sistem pangan nasional yang sangat dipengaruhi oleh eskalasi konflik bersenjata. Pertempuran yang meluas ke wilayah-wilayah penghasil pangan utama telah menghentikan aktivitas produksi melalui kerusakan infrastruktur pertanian, terbatasnya akses lahan, serta perpindahan besar-besaran petani dari daerah yang sebelumnya berperan penting dalam memasok kebutuhan nasional. Pada saat yang bersamaan, kondisi ekonomi yang memburuk ditandai oleh inflasi tinggi dan meningkatnya harga kebutuhan pokok, sehingga pendapatan rumah tangga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan nutrisi minimum. Situasi ini diperparah oleh terputusnya distribusi pangan yang menyebabkan ketersediaan makanan tidak dapat dijangkau masyarakat, meskipun stok masih ada di beberapa wilayah lain.

Faktor lain yang turut mengintensifkan krisis adalah hambatan besar terhadap penyaluran bantuan kemanusiaan. Pembatasan akses wilayah, penguasaan jalur logistik oleh aktor bersenjata, serta terbatasnya koridor pengiriman membuat bantuan yang tersedia tidak dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Akibatnya, kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil menjadi pihak yang mengalami dampak paling berat, termasuk risiko gizi buruk dan kematian.

Secara keseluruhan, krisis pangan di Sudan bukan hanya masalah kekurangan pangan semata, melainkan sebuah kondisi multidimensi yang dihasilkan dari keterkaitan konflik, tekanan ekonomi, dan hambatan kemanusiaan yang saling memperburuk satu sama lain. Upaya penanganan yang berkelanjutan tidak dapat hanya berfokus pada penyediaan pangan, tetapi juga harus mencakup stabilisasi keamanan, pemulihan ekonomi masyarakat, serta pembukaan akses kemanusiaan secara penuh agar siklus kerawanan yang berulang dapat diakhiri dan masyarakat Sudan memiliki peluang untuk kembali pulih.

DAFTAR PUSTAKA

- ACAPS. (2024). *Sudan: Humanitarian access overview*.
- Famine Early Warning Systems Network. (2024). *Sudan food security outlook update 2024*.
- Food and Agriculture Organization. (2024). *Global food security report: Sudan section*.
- Integrated Food Security Phase Classification. (2024). *Sudan: Acute food insecurity analysis April–July 2024*. IPC Global Support Unit.
- ReliefWeb. (2024). *Sudan crisis overview*.
- United Nations Children’s Fund. (2024). *Sudan humanitarian situation report*.

- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2024). *Sudan humanitarian needs and response plan 2024*.
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2024). *Sudan access snapshot October 2024*.
- World Bank Group. (2023). *Sudan economic monitor 2023*.
- World Food Programme. (2024). *Sudan emergency food security and market monitoring report*.
- World Health Organization. (2024). *Health Cluster Sudan: Situation update*.